**BAB I.**

**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagaimana yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421), dinyatakan bahwa : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra–SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Renstra SKPD Memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dan pada (2) dinyatakan : Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan pada pasal 19 ayat (4) dinyatakan : Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Rencana Strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strateji, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar perlu menyusun Perencanaan Strategis yang terangkum dalam dokumen RENSTRA Tahun 2017-2022 yang menggambarkan kemana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dokumen RENSTRA menjadi pedoman arah dan pengembangan unit kerja dan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan ke depan. Dalam dokumen RENSTRA tersebut disusun secara jelas rumusan visi, misi, tujuan sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan tahunan yang idealnya dimengerti oleh seluruh pimpinan dan pegawai di setiap unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar.

Tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar merupakan acuan untuk menganalisis kondisi Badan kesatuan Bangsa dan Politik secara internal maupun eksternal

**1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2027;
9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
11. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;

**1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

**a. Maksud**

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, baik jangka pendek maupun jangka menengah, dengan memperhatikan visi, misi, kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Pematangsiantar yang telah ditetapkan.

**b. Tujuan**

1) Tercapainya sasaran program secara efektif dan efisien sesuai kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Pematangsiantar, khususnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2) Memberikan arah dan pedoman dalam menyusun Program Kerja Tahunan.

**1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistimatika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Renstra

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah

**BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VII. PENUTUP**

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** **KOTA PEMATANGSIANTAR**

**2.1.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar, susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar terdiri atas :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **a.** | **KEPALA BADAN, membawahi;** | |
| **b.** | **Sekretaris Badan, membawahi;** | |
|  | 1. | Ka. Sub Bagian Penyusunan Program; |
|  | 2. | Ka. Sub Bagian Tata Usaha; |
|  | 3. | Ka. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. |
| **c.** | **Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi;** | |
|  | 1. | Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. |
|  | 2. | Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa: |
| **d.** | **Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi;** | |
|  | 1. | Sub bidang penanganan konflik; |
|  | 2. | Sub bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan Strategis. |
| **e.** | **Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi;** | |
|  | 1. | Sub pengembangan budaya dan etika politik; |
|  | 2. | Sub bidang fasilitasi partai politik dan pemilu . |
| **f.** | **Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi;** | |
|  | 1. | Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya ; |
|  | 2. | Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan . |
| **g.** | **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL** | |

Berdasarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| a. | penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan; |
| b. | perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis di bidang Kesatuan bangsa, Politik Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan; |
| c. | pelaksanaan hubungan kerjasama antar Lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas Politik di daerah; |
| d. | perumusan kebijakan dalam pelaksanaan, penyelamatan dan rehabilitasi terhadap berbagai ancaman atau bencana; |
| e. | pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi pekerjaan Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan / Peralatan; |

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Sekretaris Badan** | | | | |
|  | (1) | Sekretariat Badan merupakan unsur staf yang dipimpin seorang sekretaris Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan dalam mendukung kelancaran tugas Badan. | | | |
|  | (2) | Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : | | | |
|  |  | a. | pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan; | | |
|  |  | b. | pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor; | | |
|  |  | c. | pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan asset badan; | | |
|  |  | d. | perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan Badan; | | |
|  |  | e. | pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. | | |
|  | Penjabaran tugas sebagaimana yang dimaksud diatas dibagi ke dalam sub-sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Badan sebagai berikut : | | | | |
|  |  | a. | Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas: | | |
|  |  |  | 1. | menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat; | |
|  |  |  | 2. | menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; | |
|  |  |  | 3. | mengarsipkan surat masuk dan keluar; | |
|  |  |  | 4. | membantu kelancaran dan pendistribusian surat menyurat; | |
|  |  |  | 5. | melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/ barang-barang inventaris kantor; | |
|  |  |  | 6. | melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat; | |
|  |  |  | 7. | mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas. | |
|  |  |  | 8. | mengkoordinir kerjasama, pembinaan terhadap forum-forum strategis ormas, LSM dan partai politik | |
|  |  | b. | Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : | | |
|  |  |  | 1. | menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian; | |
|  |  |  | 2. | membuat rencana kebutuhan pengembangan, pemindahan dan kenaikan pangkat kepegawaian; | |
|  |  |  | 3. | membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS di lingkungan badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; | |
|  |  |  | 4. | menyusun rencana peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan informal; | |
|  |  |  | 5. | menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur. | |
|  |  | c. | Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas : | | |
|  |  |  | 1. | menyusun rencana anggaran operasional; | |
|  |  |  | 2. | melaksanakan pengurusan gaji pegawai; | |
|  |  |  | 3. | mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; | |
|  |  |  | 4. | mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; | |
|  |  |  | 5. | melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan. | |
| **2.** | **Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa** | | | | |
|  | (1) | Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; | | | |
|  | (2) | Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. | | | |
|  |  | Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut di atas meliputi: | | | |
|  |  | a. | Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan,dan karakter bangsa di wilayah kota; | | |
|  |  | b. | Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayahkota; | | |
|  |  | c. | Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kota; | | |
|  |  | d. | Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kota; | | |
|  |  | e. | Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah kota; | | |
|  |  | f. | Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah kota; | | |
|  |  | g. | Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah kota; | | |
|  |  | h. | Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kota; | | |
|  |  | i. | Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, Identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah kota; | | |
|  |  | j. | Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan diwilayah kota; | | |
|  |  | k. | Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah kota; | | |
|  |  | l. | Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah kota; | | |
|  |  | m. | Pelestarian Bhinneka Tunggal lka di wilayah kota; | | |
|  |  | n. | Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah kota; | | |
|  |  | o. | Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah kota; dan | | |
|  |  | p. | Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah kota. | | |
|  | Penjabaran tugas pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, adalah sebagai berikut: | | | | |
|  |  | **a.** | **Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.** | | |
|  |  |  | 1. | | melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang idiologi; |
|  |  |  | 2. | | merumuskan kebijakan dan melaksanakan program kerja di bidang idiologi; |
|  |  |  | 3. | | Melaksanakan upacara hari besar kenegaraan. |
|  |  | **b.** | **Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa:** | | |
|  |  |  | 1. | | melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang pelestarian negara dan bela negara; |
|  |  |  | 2. | | merumuskan kebijakan dan melaksanakan program kerja di bidang pelestarian negara dan bela Negara. |
| **3** | **Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional** | | | | |
|  | (1) | Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; | | | |
|  | (2) | Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang kewaspadaan nasional. | | | |
|  | Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut di atas meliputi: | | | | |
|  |  | a. | Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kota; | | |
|  |  | b. | Pemetaan kondisistabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kota; | | |
|  |  | c. | Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri diwilayah kota; | | |
|  |  | d. | pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah kota; | | |
|  |  | e. | pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kota; | | |
|  |  | f. | pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kota; | | |
|  |  | g. | penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kota; | | |
|  |  | h. | pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kota; | | |
|  |  | i. | penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di wilayah kota; | | |
|  |  | j. | peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kota; | | |
|  |  | k. | pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan Dini masyarakat di wilayah kota; | | |
|  |  | l. | pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah kota; | | |
|  |  | m. | pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kota; | | |
|  |  | n. | Pelaksanaan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kota; dan | | |
|  |  | o. | pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kota. | | |
|  | Penjabaran tugas pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional adalah sebagai berikut: | | | | |
|  |  | a. | Sub bidang penanganan konflik yang mempunyai tugas menangani permasalahan konflik yang terjadidi masyarakat; | | |
|  |  | b. | Sub bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas memonitoring evaluasi dan laporan kewaspadaan dari masyarakat, pemetaan rawan konflik, serta melaksanakan operasi pekat. | | |
| **4.** | **Bidang Politik Dalam Negeri** | | | | |
|  | (1) | Bidang Politik Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; | | | |
|  | (2) | Bidang politik dalam negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pembinaan politik dalam negeri. | | | |
|  | Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut di atas meliputi: | | | | |
|  |  | a. | Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah kota; | | |
|  |  | b. | Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah kota; | | |
|  |  | c. | Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah kota. | | |
|  |  | d. | Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kota; | | |
|  |  | e. | Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kota; | | |
|  |  | f. | Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kota; | | |
|  |  | g. | Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah kota; | | |
|  |  | h. | Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah kota; | | |
|  |  | i. | Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kota; | | |
|  |  | j. | Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kota; | | |
|  |  | k. | Pelaksanaan komunikasi politik dengan infrastruktur politik dalam negeri di wilayah kota; | | |
|  |  | l. | Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kota; | | |
|  |  | m. | Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kota; | | |
|  |  | n. | Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presidendi wilayah kota; | | |
|  |  | o. | Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah kota; dan | | |
|  |  | p. | Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kota. | | |
|  | Penjabaran tugas pada bidang politik dalam negeri adalah sebagai berikut: | | | | |
|  |  | a. | Sub pengembangan budaya dan etika politik yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat; | | |
|  |  | b. | Sub bidang fasilitasi partai politik dan pemilu yang mempunyai tugas: | | |
|  |  |  | 1. | | menormalisir hubungan legislatif, parpol dan fasilitas umum; |
|  |  |  | 2. | | Mendampingi DPRD dalam pelaksanaan tugas; dan |
|  |  |  | 3. | | Memproses Pergantian Antar Waktu DPRD. |
| **5.** | **Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan** | | | | |
|  | (1) | Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan; | | | |
|  | (2) | Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan. | | | |
|  | Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut di atas meliputi: | | | | |
|  |  | a. | Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kota; | | |
|  |  | b. | Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanansosial, ketahanan, seni budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota; | | |
|  |  | c. | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kota; | | |
|  |  | d. | Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kota; | | |
|  |  | e. | pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kota; | | |
|  |  | f. | pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kota; | | |
|  |  | g. | pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kota; | | |
|  |  | h. | pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kota; | | |
|  |  | i. | pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kota; | | |
|  |  | j. | fasilitas dan koordinasi penanganan kerawanan sosial diwilayah kota; | | |
|  |  | k. | pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kota; | | |
|  |  | l. | fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah kota; | | |
|  |  | m. | fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah kota; | | |
|  |  | n. | fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kota; | | |
|  |  | o. | fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota; dan | | |
|  |  | p. | pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatanasing, dan lembaga asing, serta pengadaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kota. | | |
|  | Penjabaran tugas pada bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut: | | | | |
|  |  | a. | Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mempunyai tugas : | | |
|  |  |  | 1. | | Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kota; |
|  |  |  | 2. | | pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kota; |
|  |  |  | 3. | | pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kota: |
|  |  |  | 4. | | fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kota; |
|  |  | b. | Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai tugas : | | |
|  |  |  | 1. | | Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengadaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan diwilayah kota; |
|  |  |  | 2. | | Fasilitasi dan koordinasi kerukunanan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota; |
|  |  |  | 3. | | Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kota; dan |
|  |  |  | 4. | | Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kota. |

**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Kota Pematangsiantar**

**2.2 SUMBER DAYA**

Dalam menjalankan roda Pemerintahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Kota Pematangsiantar ditopang dengan jumlah PNS sebanyak 34 orang yang dibagi sesuai dengan bidang tugas masing-masing sesuai dengan Job Describtion yang ada .

Klasifikasi Pendidikan Formal PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Kota Pematangsiantar Kota Pematangsiantar adala sebagai berkut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PENDIDIKAN** | **JUMLAH** |
| 1 | S2, S3 | 2 orang |
| 2 | S1 | 15 orang |
| 3 | D3 | 1 orang |
| 4 | SLTA | 18 orang |
| 5 | SMP | 2 orang |
| 6 | SD | - orang |
|  | **Jumlah** | **38 orang** |

Dalam Pembagian Tugas (Job Describtion) yang ada di Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Pematangsiantar yang menduduki posisi :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1. | Kepala Badan | 1 orang | Eselon II |
| 2. | Sekretaris | 1 orang | Eselon III |
| 3. | Ka.Bidang | 4 orang | Eselon III |
| 4. | Kasubbag/ Kasubbid | 11 orang | Eselon IV |
| 5. | Staf | 21 orang |  |
| **Jumlah Keseluruhan** | | **38 orang** |  |

Susunan Golongan PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **GOLONGAN** | **JUMLAH** |
| 1. | Golongan IV | 10 orang |
| 2. | Golongan III | 15 orang |
| 3. | Golongan II | 13 orang |
| 4. | Golongan I | - |
|  | **Jumlah** | **38 orang** |

Petugas Tenaga Harian Lepas Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Pematangsiantar:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH** |
| 1. | THL | 14 orang |
|  | **Jumlah** | **14 orang** |

Sumber Anggaran ditampung pada APBD Kota Pematangsiantar TA.2016 pada Pos Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Pematangsiantar, target sebesar Rp 1.579.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.554.362.587,-

Untuk periode pelayanan Tahun 2010-2015 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar sebagaimana tabel berikut :

**2.3 Kinerja Pelayanan**

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar berdasarkan sasaran/ target Renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

**Tabel 2.1. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategi** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Target Tahunan** | | | | | **Realisasi** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | ***14*** |
| 1 | Meningkatnya kebebasan  hak-hak sipil | IDI (Indeks Indeks Aspek  Kebebasan Sipil dalam Demokrasi  Indonesia) | Angka | N/A | N/A | 90.00 | 90.50 | 91.00 | N/A | N/A | N/A | 90.00 | 95.00 |
| 2 | Meningkatnya hak-hak  politik | Indeks Aspek hak-hak politik dalam  IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) | Angka | N/A | N/A | 55 | 55 | 60 | N/A | N/A | N/A | 63.05 | 62.16 |
| 3 | Meningkatnya capaian  pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD | Presentasi rata-rata hasil  ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD | % | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | 99.45 | 99.45 |

**Tabel 2.2. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2010 – 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR**  **TAHUN 2012 – 2016** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **URAIAN** | **ANGGARAN PADA TAHUN** | | | | | **REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN** | | | | | **RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN** | | | | | **RATA-RATA PERTUMBUHAN** | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| BELANJA |  |  | 2,942,640,096 | 3,866,719,611 | 4,367,491,052 |  |  | 2,851,793,559 | 3,744,501,372 | 4,171,680,293 |  |  | 96.91% | 96.84% | 95.52% | 122.18% | 121.36% |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG |  |  | 1,968,135,300 | 2,684,610,443 | 2,788,391,052 |  |  | 1,879,501,147 | 2,591,711,789 | 2,617,317,706 |  |  | 95.50% | 96.54% | 93.86% | 120.13% | 119.44% |
| BELANJA LANGSUNG |  |  | 974,504,796 | 1,182,109,168 | 1,579,100,000 |  |  | 972,292,412 | 1,152,789,583 | 1,554,362,587 |  |  | 99.77% | 97.52% | 98.43% | 127.44% | 126.70% |

**Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Pematangsiantar, yaitu:**

1. Capaian Angka Indeks Kebebasan Sipil dipengaruhi oleh faktor internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar), yaitu pembinaan empat konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI), fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu ekonomi dan sosial dalam rangka memperkuat ketahanan nasional belum optimal, dan faktor eksternal (yang merupakan di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar), yaitu peningkatan peran ormas, dan lembaga kemasyarakatan juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan aspek kebebasan sipil. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar yaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek kebebasan sipil belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan terutama pendanaan;
2. Capaian Angka Indeks Hak-Hak Politik dipengaruhi oleh variabel partisipasi politik dalam pengawasan, salah satu indikatornya adalah demonstrasi dengan kekerasan, pengaruh faktor internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar), yaitu pencegahan dini potensi kerawanan konflik politik, ekonomi, sosial dan sara belum dilakukan secara optimal pada daerah rawan konflik, dan pengaruh faktor eksternal (yang merupakan di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar), yaitu optimalisasi peran mitra kerja kesbangpol, yaitu institusi TNI dan Polri dalam pencegahan konflik pada daerah rawan konflik. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar yaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek hak-hak politik belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan (Terutama aturan dari Pemerintah Kota Pematangsiantar yang tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk dukungan operasional Tim bentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar);
3. Capaian Angka Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi dipengaruhi oleh peran birokrasi pemerintah yang seharusnya bersifat netral terhadap semua kontestan dalam penyelenggaraan pemilu / pilkada. Pengaruh faktor internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar), yaitu pendidikan budaya politik dan peran partai politik yang belum optimal terutama kepada aparatur sipil pemerintah dan kader partai politik, dan pengaruh faktor eksternal (yang merupakan di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar), yaitu optimalisasi peran KPU dan Badan Pengawas Pemilu dalam menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu/ pemilukada. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar yaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek lembaga demokrasi belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan.

**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar kendali.

1. **ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL**

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi. Dengan melakukan analisa lingkungan internal melalui penerapan metoda analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities dan Threats), akan membantu organisasi untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan secara internal, kekuatan dan kelemahan tersebut akan dijadikan alat untuk meraih peluang serta menghindari ancaman.

**1. Analisis Kekuatan (Strength)**

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategik dalam mencapai visi dan misi. Kekuatan Badan Kesatuan Bangsa & Politik adalah :

* 1. Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Pematangsiantar secara kuantitas cukup memadai.
  2. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.
  3. Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
  5. Tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan daerah.
  6. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintah kota Pematangsiantar.

**2. Analisis Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Kelemahan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.
2. Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota.
3. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

**B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL**

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (Crotical Succes Factors) bagi suatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi

**1. Analisis Peluang (Opportunities)**

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapai visi dan misi. Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Rencana pembangunan jalan tol Medan-Parapat
3. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Pematangsiantar yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar.
4. Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara nasional di seluruh lembaga dan kementerian termasuk pada pemerintah daerah untuk menciptakan good government.
5. Kedudukan Kota Pematangsiantar sebagai kota transit bagi kota-kota sekitarnya memberikan peluang dalam pengembangan usaha di bidang jasa transportasi, perdagangan, pendidikan dan industri serta jasa lainnya

**2. Analisa Ancaman (Threat)**

Ancaman adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi. Ancaman yang harus dijawab adalah sebagai berikut :

* 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif, dapat mengancam pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.
  2. Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kota Pematangsiantar sebagai kota jasa.
  3. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju migrasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Pematangsiantar.
  4. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian prosentase penyaluran dana pengembangan usaha kecil menengah masih kecil dibandingkan dengan prosentase penyaluran dana pada industri besar.
  5. Penurunan luas lahan terbuka hijau/pertanian di Kota Pematangsiantar, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau/pertanian yang akan berakibat pada pemanasan global (global warming)

**FAKTOR INTERNAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEKUATAN** | **NO** | **KELEMAHAN** |
| 1. | Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Pematangsiantar secara kuantitas cukup memadai. | 1. | Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien. |
| 2. | Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. | 2. | Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota. |
| 3. | Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. | 3. | Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. |
| 4. | Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. | 4. | Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. |
| 5. | Tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan daerah. | 5. | Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. |
| 6. | Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintah kota Pematangsiantar. | 6. | Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah |

**FAKTOR EKSTERNAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PELUANG** | **NO** | **ANCAMAN** |
| 1. | Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. | 1. | Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif, dapat mengancam pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif. |
| 2. | Rencana pembangunan jalan tol Medan-Parapat | 2. | Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kota Pematangsiantar sebagai kota jasa. |
| 3. | Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Pematangsiantar yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar. | 3. | Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju migrasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Pematangsiantar. |
| 4. | Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara nasional di seluruh lembaga dan kementerian termasuk pada pemerintah daerah untuk menciptakan good government. | 4. | Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian prosentase penyaluran dana pengembangan usaha kecil menengah masih kecil dibandingkan dengan prosentase penyaluran dana pada industri besar. |
| 5. | Kedudukan Kota Pematangsiantar sebagai kota transit bagi kota-kota sekitarnya memberikan peluang dalam pengembangan usaha di bidang jasa transportasi, perdagangan, pendidikan dan industri serta jasa lainnya |  | Penurunan luas lahan terbuka hijau/pertanian di Kota Pematangsiantar, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau/pertanian yang akan berakibat pada pemanasan global (global warming) |

**TABEL 2.5. ANALISA SWOT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTERNAL**  **EKSTERNAL** | **KEKUATAN** | **KELEMAHAN** |
| **PELUANG** | **STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG** | **STRATEGI MENANGGULANGI KENDALA/ KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN PELUANG** |
|  | * Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK. * Meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi * Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan. * Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan APBD * Mendayagunakan sarana dan prasarana * Meningkatkan inovasi dan kreativitas. * Mengembangkan sistem informasi | * Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. * Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTERNAL**  **EKSTERNAL** | **KEKUATAN** | **KELEMAHAN** |
| **ANCAMAN** | **STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MENGATASI TANTANGAN/ ANCAMAN** | **STRATEGI MEMPERKECIL KELEMAHAN DAN MENGATASI TANTANGAN/ ANCAMAN** |
|  | * Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM. * Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan. * Mewujudkan penguatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintahan | * Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan. * Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. |

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Stabilitas politik dan keamanan di Kota Pematangsiantar cenderung baik dan dinamis. Hal ini berdampak pada penurunan gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, adanya kebebasan berpolitik dan memberi pendapat di depan umum oleh setiap warga masyarakat, serta pemilihan kepala daerah secara langsung yang berjalan dengan aman, damai dan lancar.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan, keagamaan, ketertiban daerah, memberikan suasana aman bagi seluruh warga, mengembangkan strategis pengamanan daerah, pengembangan wawasan kebangsaan dan ipoleksosbud, peningkatan penegakan dan kepastian hukum serta meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

**1. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

1. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila di masyarakat.
2. Menurunnya kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara di masyarakat.
3. Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain
4. Peran Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Organisasi Kemasayarakatan dan Parpol belum maksimal dalam menyikapi isu-isu *Primordialisme* dan
5. Minimnya kegiatan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
6. Belum maksimalnya fasilitasi dan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
7. Belum maksimalnya fasilitasi dan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
8. Belum maksimalnya fasilitasi dan pembinaan Forum Bela Negara (FBN);
9. Harmonisasi hubungan antar unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pematangsiantar;

**2. Bidang Politik Dalam Negeri**

1. Tingginya angka ketidakhadiran atau absensi (golput) dalam setiap kegiatan pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilukada
2. akibat kejenuhan, apatisme masyarakat dan rendahnya kesadaran berpolitik masyarakat;
3. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kebijakan public;
4. Tingginya praktek politik uang (*money politics*) setiap pelaksanaan kegiatan pemilu;
5. Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis di masyarakat;
6. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilukada, baik antar pendukung maupun antar pasangan calon;
7. Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di masyarakat.

**3. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**

1. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya bencana sosial dan bencana alam;
2. Masih maraknya aksi-aksi unjukrasa atau demonstrasi oleh organisasi atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya;
3. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah;
4. Intensitas konflik sosial kemasyarakatan sangat tinggi, baik antar masyarakat dengan investor, antar masyarakat dengan masyarakat dan antar masyarakat dengan pemerintah sangat tinggi, terutama masalah sengketa lahan;
5. Belum maksimalnya kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan FKDM;
6. Belum maksimalnya kegiatan monitoring antisipasi cegah dini potensi konflik dan mediator penangan konflik;
7. Belum maksimalnya pengawasan terhadap aktivitas Orang Asing/Tenaga Kerja Asing/NGO;
8. Ketersediaan Peta Rawan Konflik Kota Pematangsiantar yang akurat;
9. Belum terlaksananya rencana aksi tentang Penanganan Ganguan Keamanan Dalam Negeri;
10. Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan jalan unjuk rasa atau demonstrasi yang mengarah anarkis;
11. Terjadinya Konflik dan pertikaian antar warga;
12. Peran Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan masalah gangguan keamanan dan ketertiban.

**4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan**

1. Masih tingginya angka kemiskinan yang bisa berpengaruh terhadap munculnya kesenjangan sosial, yang memicu konflik sosial ekonomi di masyarakat;
2. Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi dampak krisis global yang berimbas pada berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
4. Terjadinya dekadensi moral di masyarakat yang ditandai dengan banyaknya penyakit masyarakat, seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan miras;
5. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri.

**5. Bidang Kesekretariatan SKPD *(Manajemen dan Ketatalaksanaan Organisasi, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur serta Sarana dan Prasana)***

1. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dengan banyak tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan masyarakat tentang rendahnya kinerja sumber daya aparatur;
2. System kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum;
3. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, antara lain  jabatan struktur organisasi belum terisi sepenunya, kompetensi dan kualitas SDM Aparatur masih terbatas sehingga tupoksi yang belum terlaksana secara maksimal, manajemen SDM Aparatur belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai, indikator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat mendukung peningkatan kinerja pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Pematangsiantar;
4. Masih kurangnya  kualitas dan  kuantitas sarana dan  prasarana kerja;
5. Penggunaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;
6. Belum tertibnya penyajian data dan informasi serta penataan arsip/ dokumentasi;
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

**3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar 2017-2022 adalah pedoman bagi SKPD dalam menyusun dokumen perencanan pembangunan jangka menangah SKPD yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Dalam dokumen RJPMD Kota Pematangsiantar 2017-2022 telah termuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang harus dijabarkan dalam RENSTRA SKPD sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya.

Dalam penyusunan RENSTRA SKPD 2017-2022, khususnya dalam hal penentuan Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pematangsiantar, maka perlu dilakukan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang termuat dalam RPJMD Kota Pematangsiantar 2017-2022 dalam rangka sinergisitas dan sinkronisasi dukumen perencanaan tersebut.

Visi Kota Pematangsiantar tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022, yaitu :

**”Terwujudnya Kota Pematangsiantar MANTAP, MAJU DAN JAYA”**

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

**MANTAP**

Dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam keadaan stabil sehingga mampu memberikan andil dalam pembangunan daerah

**MAJU**

Dalam arti kinerja pembangunan daerah ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas yang secara langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Pematangsiantar secara berkelanjutan.

**JAYA**

Dalam arti hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat Pematangsiantar berhasil dengan sukses sesuai target-target yang ditetapkan dalam kinerja pembangunan

Misi Kota Pematangsiantar yang menjadi Tugas dan Kewenangan Badan Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada RPJMD Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

**1. Optimalisasi Pemerintahan Yang Bersih**

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja PNS/THL di lingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar;
2. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel serta terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan (custumer oriented).

**2. Memperkuat Sistem Ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi**

Sasaran:

1. Peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha sektor riil, UMKM, Koperasi, perdagangan dan pariwisata;
2. Peningkatan Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja), yaitu hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja.

**3. Menata Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Dan Profesional**

Sasaran:

1. Menempatkan SDM yang profesional serta sesuai kompetensi melalui proses uji kelayakan dan kepatuhan.
2. Terciptanya Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah yang efektif dan efisien berbasis *e-Government* guna mewujudkan pelayanan prima;
3. Tersosialisasinya PERDA serta diikuti dengan penegakan yang transparan;
4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) efektif dan efisien di Kota Pematangsiantar;

Untuk memenuhi harapan diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan dampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya peran badan kesatuan bangsa & politik dalam membina masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik yang baik untuk mendukung kota siantar yang mantap, maju dan jaya“***

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar merumuskan misi dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ideologi negara dan cinta tanah air;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjaga harmonisasi dan kondusivitas di daerah;
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan kehidupan sosial kemasyarakatan;
4. Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat.

Kesinambungan Visi dan Misi Kota dengan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Kesinambungan RPJMD dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2017 – 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **VISI KOTA PEMATANGSIANTAR** | **VISI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| **”Terwujudnya Kota Pematangsiantar MANTAP, MAJU DAN JAYA”** | **“Terwujudnya Peran Badan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Membina Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Kesadaran Berpolitik Yang Baik Untuk Kota Siantar Yang MANTAP, MAJU DAN JAYA“** |
| **MISI KOTA PEMATANGSIANTAR** | **MISI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA** |
| Optimalisasi Pemerintahan Yang Bersih | 1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ideologi negara dan cinta tanah air 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjaga harmonisasi dan kondusivitas di daerah |
| Memperkuat Sistem Ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi | Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan kehidupan sosial kemasyarakatan |
| Menata Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Dan Profesional | Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat |

**3.3 Telaahan Renstra Kemendagri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum)**

Berdasarkan analisis terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri terdapat 1 (satu) Program Strategis yaitu Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang secara khususnya menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Dengan sasaran program yaitu meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya; terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri; serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu:

a. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam);

b. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA;

c. Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan.

b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri

Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik.

c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik.

e. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

**Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Berdasarkan Renstra Kementerian (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan Strategis Kementarian (Dirjen Kesbangol)** | **Permasalahan Pelayanan SKPD** | **Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| 1. | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik; | Evaluasi Kelembagaan tentang Perubahan Nomenklatu, Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi | Belum terealisasi. | 1.   Permendagri 41/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.  2.   Surat Edaran Kemendagri RI Nomor : 060/4942/SJ tanggal 17/12/2010 perihal Pedoman Teknis Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah |
| 2. | Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | Belum maksimal | Ketersediaan Anggaran | Program dan Kegiatan tersedia pada setiap tahun anggaran. |
| 3. | Fasilitasi Kewaspadaan Nasional | Belum maksimal | Ketersediaan Anggaran belum mencukupi. | Program dan Kegiatan tersedia pada setiap tahun anggaran. |
| 4. | Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan | Tidak terlaksana | Perubahan Nomenklatu, Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi | Evaluasi Kelembagaan tentang Perubahan Nomenklatur, Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. |
| 5. | Fasilitasi Politik Dalam Negeri | Belum Maksimal | ketersediaan anggaran yang belum mencukupi | Program dan Kegiatan tersedia pada setiap tahun anggaran. |
| 6. | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi | Tidak terlaksana | Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi | Evaluasi Kelembagaan tentang Perubahan Nomenklatu, Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. |

**3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKota Pematangsiantar dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Pematangsiantar pada tahun 2017-2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

* + 1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
    2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
    3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
    4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
    5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
    6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
    7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Pematangsiantar yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan; |
| 2. | perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis di bidang Kesatuan bangsa, Politik Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan; |
| 3. | pelaksanaan hubungan kerjasama antar Lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas Politik di daerah; |
| 4. | perumusan kebijakan dalam pelaksanaan, penyelamatan dan rehabilitasi terhadap berbagai ancaman atau bencana; |
| 5. | pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi pekerjaan Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan / Peralatan; |

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategi adalah kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKota Pematangsiantar dapat diidentifikasikan beberapa hal sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKota Pematangsiantar dan Dinamika Lingkungan Strategis**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tupoksi** | **Isu Strategis** |
| 1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya | 1. Konfik politik pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presidan dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dapat menyebabkan instabilitas politik yang berdampak kurang kondusifnya stabilitas nasional dan daerah. 2. Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradab dapat menghambat proses demokratisasi. 3. Merosotnya kredibilatas pemerintahan dan peneggakan hukum mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tirami massa/sosial 4. Mengejalanya erosi Nasonalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Euforia reformasi yang makin menguat yang ditandai antara lain dengan kecendrungan mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain, sehingga menghambat proses pendewasaan prilaku berdemokrasi. |

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah**

**Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program**

**1) Tujuan**

Untuk mencapai Visi serta untuk melaksanakan Misi tersebut di atas, dan juga untuk memecahkan permasalahan serta untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017-2022, yaitu :

a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik;

b. Meningkatakan kemampuan UKM dan Koperasi dari segi penataan, pengelola manajemen, permodalan, pertumbuhan dunia usaha dengan meningkatkan peran bersama antara pengusaha besar dengan UKM dan Koperasi melalui kerjasama yang saling menguntung kan dalam konteks kemitrasejajaran yang didukung oleh iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan investasi;

c. Menata system Pelayanan Publik yang lebih baik dan Profesional.

**2) Sasaran**

Sebagai derivasi dari masing-masing tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017-2022, yaitu :

1. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel;
2. Terciptanya kualitas pelayanan public yang prima serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya;
4. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang taat dan berazaskan hukum.

**BAB V**

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2017-2022. Arah Kebijakan untuk setiap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, sebagai berikut:

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Visi : Terwujudnya Peran Badan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Membina Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Kesadaran Berpolitik Yang Baik Untuk Kota Siantar Yang MANTAP, MAJU DAN JAYA** | | | |
| **Misi 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ideologi negara dan cinta tanah air** | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik | Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel | Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara. | Peningkatan pengamalan masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara |
|  |  |  |  |
| **Misi 2 : Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam upaya menjaga harmonisasi dan kondusivitas daerah** | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik | Terciptanya kualitas pelayanan public yang prima serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 1. Meningkatkan upaya deteksi dini kerawanan Ipoleksosbudhankam | 1. Pencegahan kerawanan Ipoleksosbudhankam melalui upaya deteksi dini |
| 2. Meningkatnya kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama | 2. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama |
| 3. Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan | 3. Sinergitas Forum-forum Strategis (Forkopimda, FKUB, FPK, FKDM, Forkala) |
|  |  |  |  |
| **Misi 3 : Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan kehidupan sosial kemasyarakatan** | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatakan kemampuan UKM dan Koperasi dari segi penataan, pengelola manajemen, permodalan, pertumbuhan dunia usaha dengan meningkatkan peran bersama antara pengusaha besar dengan UKM dan Koperasi melalui kerjasama yang saling menguntung kan dalam konteks kemitrasejajaran yang didukung oleh iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan investasi | Meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya | 1. Meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kota Pematangsiantar | 1. Fasilitasi Kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat |
| 2. Peningkatan pemberdayaan Ormas dalam kehidupan masyarakat yang kondusif | 2. Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas |
|  |  |
|  |  |  |  |
| **Misi 4 : Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat** | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Menata system Pelayanan Publik yang lebih baik dan Profesional | Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang taat dan berazaskan hukum | Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban | 1. Peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik. |
| 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi yang tertuang pada bab sebelumnya, maka dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya ditetapkan langkah operasional yang dituangkan dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program, kegiatan dan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tahun 2017-2022 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel T-C.27.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kota Pematangsiantar 2017-2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **Kode** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Data capaian pada Tahun awal perencanaan (2017)** | **TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA SKPD** | | **Unit Kerja Penanggung Jawab** | **Lokasi** |
| **Tahun 2018** | | **Tahun 2019** | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | **Tahun 2022** | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | | | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** | **(16)** | **(17)** | **(18)** | **(19)** | **(20)** | **(21)** |
| **1** | **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik** | **1.   Terwujudnya pemerintahan yang responsive, transparan, dan akuntabel** | **1.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | **Tersedianya Admistrasi Perkantoran** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya kegiatan surat-menyurat |  | 12 bln | 6,050,000 | 12 bln | 7,260,000 | 12 bln | 8,712,000 | 12 bln | 10,454,400 | 12 bln | 12,545,280 | 60 bln | 45,021,680 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | **18,710,936** | 12 bln | 30,800,000 | 12 bln | 36,960,000 | 12 bln | 44,352,000 | 12 bln | 53,222,400 | 12 bln | 63,866,880 | 60 bln | 229,201,280 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | **17,196,000** | 12 bln | 48,950,000 | 12 bln | 58,740,000 | 12 bln | 70,488,000 | 12 bln | 84,585,600 | 12 bln | 101,502,720 | 60 bln | 364,266,320 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | **21,621,000** | 12 bln | 39,050,000 | 12 bln | 46,860,000 | 12 bln | 56,232,000 | 12 bln | 67,478,400 | 12 bln | 80,974,080 | 60 bln | 290,594,480 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Penyediaan peralatan rumah tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | **5,708,000** | 12 bln | 7,700,000 | 12 bln | 9,240,000 | 12 bln | 11,088,000 | 12 bln | 13,305,600 | 12 bln | 15,966,720 | 60 bln | 57,300,320 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  | 12 bln | 7,150,000 | 12 bln | 8,580,000 | 12 bln | 10,296,000 | 12 bln | 12,355,200 | 12 bln | 14,826,240 | 60 bln | 53,207,440 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman | **9,000,000** | 12 bln | 19,800,000 | 12 bln | 23,760,000 | 12 bln | 28,512,000 | 12 bln | 34,214,400 | 12 bln | 41,057,280 | 60 bln | 147,343,680 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | TerlaksananyaRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | **297,045,110** | 12 bln | 357,060,000 | 12 bln | 428,472,000 | 12 bln | 514,166,400 | 12 bln | 616,999,680 | 12 bln | 740,399,616 | 60 bln | 2,657,097,696 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor | **27,550,000** | 12 bln | 63,800,000 | 12 bln | 76,560,000 | 12 bln | 91,872,000 | 12 bln | 110,246,400 | 12 bln | 132,295,680 | 60 bln | 474,774,080 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Penyediaan Jasa Pelayanan THL/ PNS Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan THL/ PNS Daerah | **252,174,700** | 12 bln | 340,450,000 | 12 bln | 408,540,000 | 12 bln | 490,248,000 | 12 bln | 588,297,600 | 12 bln | 705,957,120 | 60 bln | 2,533,492,720 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | **Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pembangunan Gedung Kantor** | | Tersedianya gedung kantor |  | 1 Unit | 2,000,000,000 |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 unit |  | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | **Pengadaan perlengkapan gedung kantor** | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | **139,125,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Belanja Modal Pengadaan Komputer | Tersedianya Komputer |  | 6 Unit | 120,000,000 | 6 Unit | 144,000,000 | 6 Unit | 172,800,000 | 6 Unit | 207,360,000 | 6 Unit | 248,832,000 |  | 892,992,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Belanja modal Pengadaan meja kerja | Tersedianya meja kerja |  | 44 unit | 66,000,000 | 44 unit | 79,200,000 | 44 unit | 95,040,000 | 44 unit | 114,048,000 | 44 unit | 136,857,600 |  | 491,145,600 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Belanja modal Pengadaan kursi kerja | Tersedianya kursi kerja |  | 44 unit | 64,000,000 | 44 unit | 76,800,000 | 44 unit | 92,160,000 | 44 unit | 110,592,000 | 44 unit | 132,710,400 |  | 476,262,400 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Belanja modal Pengadaan Meja Rapat | Tersedianya Meja Rapat |  | 1 unit | 25,000,000 | 1 unit | 30,000,000 | 1 unit | 36,000,000 | 1 unit | 43,200,000 | 1 unit | 51,840,000 |  | 186,040,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Belanja modal Pengadaan kursi Rapat | Tersedianya Kursi Rapat |  | 50 unit | 50,000,000 | 50 unit | 60,000,000 | 50 unit | 72,000,000 | 50 unit | 86,400,000 | 50 unit | 103,680,000 |  | 372,080,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **Kode** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Data capaian pada Tahun awal perencanaan (2017)** | **TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA SKPD** | | **Unit Kerja Penanggung Jawab** | **Lokasi** |
| **Tahun 2018** | | **Tahun 2019** | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | **Tahun 2022** | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | | | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** | **(16)** | **(17)** | **(18)** | **(19)** | **(20)** | **(21)** |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan dinas Roda 4 | | Tersedianya Transportasi bagi Pejabat |  | 1 Unit | 350,000,000 | 1 Unit |  | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - |  |  | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 | | Tersedianya Transportasi bagi Pejabat |  | 2 Unit | 49,500,000 | 2 Unit | 59,400,000 | 2 Unit | 71,280,000 | 2 Unit | 85,536,000 | 2 Unit | 102,643,200 |  | 368,359,200 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | **52,833,000** | 100% | 123,200,000 | 100% | 147,840,000 | 100% | 177,408,000 | 100% | 212,889,600 | 100% | 255,467,520 |  | 916,805,120 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | **24,200,000** | 100% | 27,700,000 | 100% | 33,240,000 | 100% | 39,888,000 | 100% | 47,865,600 | 100% | 57,438,720 |  | 206,132,320 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,875,400,000 |  | 630,480,000 |  | 756,576,000 |  | 907,891,200 |  | 1,089,469,440 |  | 6,259,816,640 | Bakesbang Pol |  |
|  |  | **2.        Terciptanya kualitas pelayanan public yang prima sertam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan** | **1.** | **Program peningkatan disiplin aparatur** | | | **Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan | **-** | 55 stel | 86,000,000 | 55 stel | 103,200,000 | 55 stel | 123,840,000 | 55 stel | 148,608,000 | 55 stel | 178,329,600 | 265 stel | 639,977,600 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal | **25,000,000** | 10 Org | 146,300,000 | 10 Org | 175,560,000 | 10 Org | 210,672,000 | 10 Org | 252,806,400 | 10 Org | 303,367,680 | 50 Org | 1,088,706,080 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Peningkatan Senam Kesegaran Jasmani/ Kesehatan jasmani | Meningkatnya Kemampuan Fisik Aparatur | **6,000,000** | 12 bln | 146,300,000 | 12 bln | 175,560,000 | 12 bln | 210,672,000 | 12 bln | 252,806,400 | 12 bln | 303,367,680 | 12 bln | 1,088,706,080 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **3.** | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | | **Terwujudnya Peningkatan Admistrasi Keuangan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | **-** | 1 Lap | 19,800,000 | 1 Lap | 23,760,000 | 1 Lap | 28,512,000 | 1 Lap | 34,214,400 | 1 Lap | 41,057,280 | 5 lap | 147,343,680 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah** | | | **Terwujudnya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / arsip** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah | Terlaksananya Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah | **-** | 100% | 71,500,000 | 100% | 85,800,000 | 100% | 102,960,000 | 100% | 123,552,000 | 100% | 148,262,400 | 100% | 532,074,400 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Program perencanaan pembangunan** | | | **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Pembuatan Rencana Strategis, Rencana Kerja serta Pembuatan LAKIP, LPPD dan LKPJ | Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Tugas | **-** | 13 Lap | 19,800,000 | 13 Lap | 23,760,000 | 13 Lap | 28,512,000 | 13 Lap | 34,214,400 | 13 Lap | 41,057,280 | 65 lap | 147,343,680 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **Kode** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Data capaian pada Tahun awal perencanaan (2017)** | **TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA SKPD** | | **Unit Kerja Penanggung Jawab** | **Lokasi** |
| **Tahun 2018** | | **Tahun 2019** | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | **Tahun 2022** | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | | | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** | **(16)** | **(17)** | **(18)** | **(19)** | **(20)** | **(21)** |
|  |  |  | **6** | **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** | | |  | **440,320,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Pelatihan Pendidikan Bela Negara | Meningkatkan Rasa Nasionalime dan cinta tanah air | **-** | 1 Diklat | 489,500,000 | 1 Diklat | 587,400,000 | 1 Diklat | 704,880,000 | 1 Diklat | 845,856,000 | 1 Diklat | 1,015,027,200 | 5 diklat | 3,642,663,200 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) | Menjaga kelestarian adat dan budaya | **-** | 1 Keg | 88,000,000 | 1 Keg | 105,600,000 | 1 Keg | 126,720,000 | 1 Keg | 152,064,000 | 1 Keg | 182,476,800 | 5 keg | 654,860,800 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Pranata Sosial | Menjaga stabilitas dan hubungan antar kelompok masyarakat | **-** | 1 lmbg | 292,600,000 | 1 lmbg | 351,120,000 | 1 lmbg | 421,344,000 | 1 lmbg | 505,612,800 | 1 lmbg | 606,735,360 | 1 lmbg | 2,177,412,160 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Wawasan Kebangsaan (Empat Pilar Kebangsaan) | Tersedianya informasi tentang peraturan dan undang-undang | **-** | 1 Sos | 57,750,000 | 1 Sos | 69,300,000 | 1 Sos | 83,160,000 | 1 Sos | 99,792,000 | 1 Sos | 119,750,400 | 5 Sos | 429,752,400 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  | Upacara Hari Pendidikan Nasional | Meningkatnya Rasa Kepedulian terhadap Pendidikan |  | 1 Upcr | 90,000,000 | 1 Upcr | 108,000,000 | 1 Upcr | 129,600,000 | 1 Upcr | 155,520,000 | 1 Upcr | 186,624,000 | 5 Upcr | 669,744,000 |  | P. Siantar |
|  |  |  | Upacara Hari Kebangkitan Nasional | memelihara dan menguatkan semangat nasionalisme kebangsaan |  | 1 Upcr | 90,000,000 | 1 Upcr | 108,000,000 | 1 Upcr | 129,600,000 | 1 Upcr | 155,520,000 | 1 Upcr | 186,624,000 | 5 Upcr | 669,744,000 |  | P. Siantar |
|  |  |  | Upacara Hari Lahir Pancasila | menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara |  | 1 Upcr | 120,000,000 | 1 Upcr | 144,000,000 | 1 Upcr | 172,800,000 | 1 Upcr | 207,360,000 | 1 Upcr | 248,832,000 | 5 Upcr | 892,992,000 |  | P. Siantar |
|  |  |  | Upacara HUT Kemerdekaan RI | Meningkatnya rasa nasionalisme |  | 1 Upcr | 450,000,000 | 1 Upcr | 540,000,000 | 1 Upcr | 648,000,000 | 1 Upcr | 777,600,000 | 1 Upcr | 933,120,000 | 5 Upcr | 3,348,720,000 |  | P. Siantar |
|  |  |  | Upacara Hari Kesaktian Pancasila | Mengenang Tragedi Nasional |  | 1 Upcr | 120,000,000 | 1 Upcr | 144,000,000 | 1 Upcr | 172,800,000 | 1 Upcr | 207,360,000 | 1 Upcr | 248,832,000 | 5 Upcr | 892,992,000 |  | P. Siantar |
|  |  |  | Upacara Hari Sumpah Pemuda | Meningkatkan Rasa Kebanggaan menjadi Bangsa Indonesia |  | 1 Upcr | 90,000,000 | 1 Upcr | 108,000,000 | 1 Upcr | 129,600,000 | 1 Upcr | 155,520,000 | 1 Upcr | 186,624,000 | 5 Upcr | 669,744,000 |  | P. Siantar |
|  |  |  | Upacara Hari Pahlawan | Menghargai Jasa-jasa Pahlawan |  | 1 Upcr | 120,000,000 | 1 Upcr | 144,000,000 | 1 Upcr | 172,800,000 | 1 Upcr | 207,360,000 | 1 Upcr | 248,832,000 | 5 Upcr | 892,992,000 |  | P. Siantar |
|  |  |  | Upacara Hari Otonomi Daerah | mmemperkuat kapasitas Otonomi di daerah |  | 1 Upcr | 60,000,000 | 1 Upcr | 72,000,000 | 1 Upcr | 86,400,000 | 1 Upcr | 103,680,000 | 1 Upcr | 124,416,000 | 5 Upcr | 446,496,000 |  | P. Siantar |
|  |  |  | Upacara Hari Bela Negara | Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara |  | 1 Upcr | 60,000,000 | 1 Upcr | 72,000,000 | 1 Upcr | 86,400,000 | 1 Upcr | 103,680,000 | 1 Upcr | 124,416,000 | 5 Upcr | 446,496,000 |  | P. Siantar |
|  |  |  |  |  | - | Kegiatan Upacara setiap tanggal 17 setiap bulannya/ Apel gabungan | Meningkatnya Kesadaran Nasional ASN dilingkungan Pemko P.Siantar. |  | 5 Upcr | 250,000,000 | 5 Upcr | 300,000,000 | 5 Upcr | 360,000,000 | 5 Upcr | 432,000,000 | 5 Upcr | 518,400,000 | 5 Upcr | 1,860,400,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Gebyar Lintas Budaya (Karnaval Kebudayaan) | Terpeliharanya Kebudayaan |  | 1 Keg | 58,850,000 | 1 Keg | 70,620,000 | 1 Keg | 84,744,000 | 1 Keg | 101,692,800 | 1 Keg | 122,031,360 | 5 keg | 437,938,160 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | Meningkatnya Rasa Wawasan Kebangsaan. |  | 1 Keg | 63,800,000 | 1 Keg | 76,560,000 | 1 Keg | 91,872,000 | 1 Keg | 110,246,400 | 1 Keg | 132,295,680 | 25 keg | 474,774,080 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama |  | 100% | 195,250,000 | 100% | 234,300,000 | 100% | 281,160,000 | 100% | 337,392,000 | 100% | 404,870,400 | 100% | 1,452,972,400 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **Kode** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Data capaian pada Tahun awal perencanaan (2017)** | **TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA SKPD** | | **Unit Kerja Penanggung Jawab** | **Lokasi** |
| **Tahun 2018** | | **Tahun 2019** | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | **Tahun 2022** | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | | | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** | **(16)** | **(17)** | **(18)** | **(19)** | **(20)** | **(21)** |
|  |  |  | **7** | **Program Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | Meningkatnya Toleransi antar Umat Beragama |  | 1 Forum | 300,000,000 | 1 Forum | 360,000,000 | 1 Forum | 432,000,000 | 1 Forum | 518,400,000 | 1 Forum | 622,080,000 | 1 Forum | 2,232,480,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) | Meningkatnya sinergitas pimpinan daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual |  | 1 Forum | 600,000,000 | 1 Forum | 720,000,000 | 1 Forum | 864,000,000 | 1 Forum | 1,036,800,000 | 1 Forum | 1,244,160,000 | 1 Forum | 4,464,960,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) | Menjaga kelestarian adat dan budaya |  | 1 Forum | 90,000,000 | 1 Forum | 108,000,000 | 1 Forum | 129,600,000 | 1 Forum | 155,520,000 | 1 Forum | 186,624,000 | 1 Forum | 669,744,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) |  |  | 1 Forum | 120,000,000 | 1 Forum | 144,000,000 | 1 Forum | 172,800,000 | 1 Forum | 207,360,000 | 1 Forum | 248,832,000 | 1 Forum | 892,992,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Coffee Morning Toga, Toma dengan FORKOPIMDA | Meningkatnya sinergitas pimpinan daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual | **196,720,650** | 100% | 600,000,000 | 100% | 720,000,000 | 100% | 864,000,000 | 100% | 1,036,800,000 | 100% | 1,244,160,000 | 100% | 4,464,960,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Peningkatan Nilai-nilai luhur Budaya Bangsa (Apel Kebangsaan) | Meningkatnya sinergitas pimpinan daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual | **149,884,000** | 100% | 600,000,000 | 100% | 720,000,000 | 100% | 864,000,000 | 100% | 1,036,800,000 | 100% | 1,244,160,000 | 100% | 4,464,960,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **8.** | **Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan** | | | **Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah | Terlaksananya Operasional Tim Kominda | **87,000,000** | 12 bln | 206,800,000 | 12 bln | 248,160,000 | 12 bln | 297,792,000 | 12 bln | 357,350,400 | 12 bln | 428,820,480 | 60 bln | 1,538,922,880 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Pembinaan Jaringan Tim KOMINDA | Tersedianya Sarana Operasional Personil Kominda |  | 12 bln | 97,900,000 | 12 bln | 117,480,000 | 12 bln | 140,976,000 | 12 bln | 169,171,200 | 12 bln | 203,005,440 | 60 bln | 728,532,640 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri | Tercapainya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan |  | 8 Kec. + 53 kel | 150,150,150 | 8 Kec. + 53 kel | 180,180,180 | 8 Kec. + 53 kel | 216,216,216 | 8 Kec. + 53 kel | 259,459,459 | 8 Kec. + 53 kel | 311,351,351 | 8 Kec. + 53 kel | 1,117,357,356 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  | - | Operasionalisasi Rencana Aksi/Konflik | Tersedianya personil penanganan masalah dan konflik | **20,905,000** | 8 kec | 110,000,000 | 8 kec | 132,000,000 | 8 kec | 158,400,000 | 8 kec | 190,080,000 | 8 kec | 228,096,000 | 8 kec | 818,576,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Pengawasan Orang Asing | Pendataan dan monitoring kebedaraan orang asing |  | 100% | 73,150,000 | 100% | 87,780,000 | 100% | 105,336,000 | 100% | 126,403,200 | 100% | 151,683,840 | 100% | 544,353,040 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  |  |  | 638,000,150 |  | 765,600,180 |  | 918,720,216 |  | 1,102,464,259 |  | 1,322,957,111 |  |  |  |  |
| **9** | **Program Pengembangan Sistem Peringatan Dini dalam Penanganan Konflik** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Penyelenggaraan forum-forum dialog di daerah dalam rangka kewaspadaan nasional | tersedianya forum dialog didaerah dalam rangka kewaspadaan nasional |  | 5 forum | 58,850,000 | 5 forum | 70,620,000 | 5 forum | 84,744,000 | 5 forum | 101,692,800 | 5 forum | 122,031,360 | 25 forum | 437,938,160 | Bakesbang Pol | P. Siantar |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **Kode** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Data capaian pada Tahun awal perencanaan (2017)** | **TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA SKPD** | | **Unit Kerja Penanggung Jawab** | **Lokasi** |
| **Tahun 2018** | | **Tahun 2019** | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | **Tahun 2022** | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | | | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** | **(16)** | **(17)** | **(18)** | **(19)** | **(20)** | **(21)** |
|  |  |  |  |  | - | penyelenggaraan forum dialog dalam rangka pemantauan dan pengawasan aktivitas orang asing di daerah | tersedianya data hasil pemantauaan dan pengawasan aktivitas orang asing di daerah |  | 1 forum | 60,000,000 | 1 forum | 72,000,000 | 1 forum | 86,400,000 | 1 forum | 103,680,000 | 1 forum | 124,416,000 | 5 forum | 446,496,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | identifikasi pemetaan potensi konflik di daerah | tersedianya data hasil identifikasi potensi konflik yang ada di daerah |  | 5 data base | 90,000,000 | 5 data base | 108,000,000 | 5 data base | 129,600,000 | 5 data base | 155,520,000 | 5 data base | 186,624,000 | 25 data base | 669,744,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | penyelenggaran forum dialog dalam rangka cegah dini terhadap perkembangan konflik di daerah dan pembahasan isi strategis lainnya | menurunnya konflik di daerah |  | 1 forum | 40,000,000 | 1 forum | 48,000,000 | 1 forum | 57,600,000 | 1 forum | 69,120,000 | 1 forum | 82,944,000 | 1 forum | 297,664,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | koordinasi unsur intelijen dalam penanganan gangguan kemanan nasional di daerah | terciptanya penanganan gangguan kemanan nasional di daerah |  | 12 bln | 30,000,000 | 12 bln | 36,000,000 | 12 bln | 43,200,000 | 12 bln | 51,840,000 | 12 bln | 62,208,000 | 60 bln | 223,248,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Operasionalisasi sistem peringatan dini dalam rangka penanganan konflik | Beroperasinya Sistem Peringatan Dini Dalam Penanganan Konflik |  | 12 bln | 156,000,000 | 12 bln | 187,200,000 | 12 bln | 224,640,000 | 12 bln | 269,568,000 | 12 bln | 323,481,600 | 60 bln | 1,160,889,600 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.** |  |  | **10.** | **Program Pendidikan Politik Masyarakat** | | | **Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Hak dan kewajiban dalam politik** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Koordinasi forum-forum diskusi politik | Tersedianya forum diskusi antar lembaga politik | **11,500,000** | 2 diskusi | 150,000,000 | 2 diskusi | 180,000,000 | 2 diskusi | 216,000,000 | 2 diskusi | 259,200,000 | 2 diskusi | 311,040,000 | 10 diskusi | 1,116,240,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Fasilitasi Pembinaan Parpol | Penyedian sarana dan informasi bagi Parpol |  | 10 parpol | 120,000,000 | 10 parpol | 144,000,000 | 10 parpol | 172,800,000 | 10 parpol | 207,360,000 | 10 parpol | 248,832,000 | 10 parpol | 892,992,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Kunjungan Kerja Pendamping DPRD | Pendampingan anggota DPRD ke Lapangan | **52,822,962** | 30 DPRD | 200,000,000 | 30 DPRD | 240,000,000 | 30 DPRD | 288,000,000 | 30 DPRD | 345,600,000 | 30 DPRD | 414,720,000 | 30 DPRD | 1,488,320,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Cipta Kondisi Masyarakat Demokratis | Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk memberikan pendapat |  | 1 sosia lisasi | 240,000,000 | 1 sosia lisasi | 288,000,000 | 1 sosia lisasi | 345,600,000 | 1 sosia lisasi | 414,720,000 | 1 sosia lisasi | 497,664,000 | 5 sosia lisasi | 1,785,984,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  | - | Forum Group Discussion dengan Parpol | Terlaksananya komuniikasi antara pemerintah dengan Parpol |  | 2 diskusi | 180,000,000 | 2 diskusi | 216,000,000 | 2 diskusi | 259,200,000 | 2 diskusi | 311,040,000 | 2 diskusi | 373,248,000 | 10 diskusi | 1,339,488,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terwujudnya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | **8,080,000** | 10 Laporan | 90,000,000 | 10 Laporan | 108,000,000 | 10 Laporan | 129,600,000 | 10 Laporan | 155,520,000 | 10 Laporan | 186,624,000 | 10 Laporan | 669,744,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Aturan | **41,275,000** | 1 sosia lisasi | 64,850,000 | 1 sosia lisasi | 77,820,000 | 1 sosia lisasi | 93,384,000 | 1 sosia lisasi | 112,060,800 | 1 sosia lisasi | 134,472,960 | 5 sosia lisasi | 482,587,760 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Kegiatan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol | Terlaksanya Kegiatan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol |  | 10 parpol | 64,850,000 | 10 parpol | 77,820,000 | 10 parpol | 93,384,000 | 10 parpol | 112,060,800 | 10 parpol | 134,472,960 | 10 parpol | 482,587,760 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **Kode** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Data capaian pada Tahun awal perencanaan (2017)** | **TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA SKPD** | | **Unit Kerja Penanggung Jawab** | **Lokasi** |
| **Tahun 2018** | | **Tahun 2019** | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | **Tahun 2022** | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | | | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** | **(16)** | **(17)** | **(18)** | **(19)** | **(20)** | **(21)** |
|  |  |  | **11.** | **Program Dukungan Kelancaran Pemilu** | | | **Terpantaunya pelaksanan Pemilu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **P. Siantar** |
|  |  |  | Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat | Tercapainya Administrasi Keberadaaan dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol |  | 2 keg | 50,000,000 | 4 keg | 200,000,000 |  |  |  |  | 2 keg | 400,000,000 | 8 keg | 650,000,000 | Bakesbang Pol | **P. Siantar** |
|  |  |  | Posko Pemilu | Terwujudnya Pelaksanaan Desk Pemilu |  | 1 Posko | 150,000,000 | 1 Posko | 600,000,000 |  |  |  |  | 1 Posko | 800,000,000 | 3 Posko | 1,550,000,000 | Bakesbang Pol | **P. Siantar** |
|  |  |  | Monitoring pelaksanaan Pemilu | terpantaunya Tahapan Pelaknaan Pemilu |  | 1 tim | 120,000,000 | 1 tim | 200,000,000 |  |  |  |  | 1 tim | 300,000,000 | 3 tim | 620,000,000 | Bakesbang Pol | **P. Siantar** |
|  |  |  | Pendidikan Politik bagi anggota Masyarakat | Meningkatnya Kesadaran masyarakat atas demokrasi |  | 4 Keg | 180,000,000 | 4 Keg | 200,000,000 |  |  |  |  | 4 Keg | 300,000,000 | 12 Keg | 680,000,000 | Bakesbang Pol | **P. Siantar** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **12.** | **Program Pemetaan, Pemantauan dan Pelaporan Situasi daerah** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Komunikasi Sosial untuk meningkatkan ketahanan Sosial | Meningkatnya persatuan kesatuan bangsa |  | 50% | 12,000,000 | 55% | 14,400,000 | 60% | 17,280,000 | 65% | 20,736,000 | 70% | 24,883,200 | 100% | 89,299,200 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  | Penguatan peran pemda dalam mendorong stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat di daerah | Meningkatnya pemahaman aparatur tentang pentingnya koordinasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat |  | 50% | 72,000,000 | 55% | 86,400,000 | 60% | 103,680,000 | 65% | 124,416,000 | 70% | 149,299,200 | 100% | 535,795,200 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  |  | Monitoring evaluasi dan pelaporan 9 bahan poko, BBM, Elpiji menjelang Bulan Ramadhan/Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru | Mendapatkan data daerah rawan pangan | **16,500,000** | 3 Keg | 16,000,000 | 3 Keg | 19,200,000 | 3 Keg | 23,040,000 | 3 Keg | 27,648,000 | 3 Keg | 33,177,600 | 15 Keg | 119,065,600 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bagi Masyarakat dan Mahasiswa | Pemberantasan, Pengedaran dan Pemakai Narkoba yang sudah merajalela dikalangan Mahasiswa dan Masyarakat. | **103,302,485** | 200 org | 240,000,000 | 200 org | 288,000,000 | 200 org | 345,600,000 | 200 org | 414,720,000 | 200 org | 497,664,000 | 1000 org | 1,785,984,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Pemantapan ketahanan seni dan budaya sebagai perekat bangsa | tercapainya Pemantapan ketahanan seni dan budaya sebagai perekat bangsa |  | 1 pertemuan | 50,000,000 | 1 pertemuan | 60,000,000 | 1 pertemuan | 72,000,000 | 1 pertemuan | 86,400,000 | 1 pertemuan | 103,680,000 | 5 pertemuan | 372,080,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Gelar seni budaya nusantara dan temu Tokoh Adat dan Tokoh Budaya di daerah | Terselenggaranya Gelar seni budaya dan temu tokoh |  | 1 pagelaran seni budaya | 120,000,000 | 1 pagelaran seni budaya | 144,000,000 | 1 pagelaran seni budaya | 172,800,000 | 1 pagelaran seni budaya | 207,360,000 | 1 pagelaran seni budaya | 248,832,000 | 5 pagelaran seni budaya | 892,992,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Pemetaan Sosial, Seni dan Budaya | Terlaksananya Pemetaan Sosial, Seni dan Budaya |  | 1 data base | 100,000,000 | 1 data base | 120,000,000 | 1 data base | 144,000,000 | 1 data base | 172,800,000 | 1 data base | 207,360,000 | 1 data base | 744,160,000 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Koordinasi forum-forum diskusi ORMAS | Tersedianya forum diskusi antar lembaga politik |  | 20 Ormas | 66,000,000 | 30 Ormas | 79,200,000 | 40 Ormas | 95,040,000 | 50 Ormas | 114,048,000 | 60 Ormas | 136,857,600 | 200 Ormas | 491,145,600 | Bakesbang Pol | P. Siantar |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **Kode** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Data capaian pada Tahun awal perencanaan (2017)** | **TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA SKPD** | | **Unit Kerja Penanggung Jawab** | **Lokasi** |
| **Tahun 2018** | | **Tahun 2019** | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | **Tahun 2022** | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | | | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** | **(16)** | **(17)** | **(18)** | **(19)** | **(20)** | **(21)** |
|  |  |  |  |  | - | Fasilitasi Pembinaan Ormas | Penyedian sarana dan informasi bagi Parpol |  | 10 Ormas | 58,850,000 | 10 Ormas | 70,620,000 | 10 Ormas | 84,744,000 | 10 Ormas | 101,692,800 | 10 Ormas | 122,031,360 | 50 Ormas | 437,938,160 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Forum Group Discussion dengan ORMAS | Terlaksananya komuniikasi antara pemerintah dengan Parpol |  | 1 FGD | 146,300,000 | 1 FGD | 175,560,000 | 1 FGD | 210,672,000 | 1 FGD | 252,806,400 | 1 FGD | 303,367,680 | 5 FGD | 1,088,706,080 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Monitoring, evaluasi dan pelaporan ORMAS & LSM | Terwujudnya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan |  | 1 laporan | 70,400,000 | 1 laporan | 84,480,000 | 1 laporan | 101,376,000 | 1 laporan | 121,651,200 | 1 laporan | 145,981,440 | 5 laporan | 523,888,640 | Bakesbang Pol | P. Siantar |
|  |  | - | Kegiatan Verifikasi Persyaratan Administrasi Organisasi Kemasyarakatan | Terlaksanya Kegiatan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol |  | 20 Ormas | 62,480,000 | 30 Ormas | 74,976,000 | 40 Ormas | 89,971,200 | 50 Ormas | 107,965,440 | 60 Ormas | 129,558,528 | 200 Ormas | 464,951,168 | Bakesbang Pol | P. Siantar |

Pematangsiantar, Oktober 2018

Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik

Kota Pematangsiantar

Drs. LUKAS BARUS

Pembina Tk. I

Nip. 19630609 199003 1 004

**BAB VII**

**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Indikator Kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar 2017-2022, adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar 2017-2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Terwujudnya pengamalan masyarakat Kota Pematangsiantar terhadap Konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara | 1. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. | 85% | 87% | 88% | 89% | 90% |
|  | 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PPBN | 85% | 86% | 87% | 89% | 90% |
| 2 | Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara | Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan | 1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama penyelesaian konflik di daerah | 85% | 87% | 88% | 89% | 90% |
|  | 2. Meningkatnya Pemantauan kualitas keamanan di daerah | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% |
| 3 | Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama dan kemasyarakatan di Kota Pematangsiantar | Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif | 1. Menurunnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat | 60% | 55% | 50% | 40% | 30% |
|  | 2. Meningkatnya peran Ormas dalam pembangunan di Kota Pematangsiantar | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% |
| 4 | Terwujudnya kehidupan politik masyarakat Kota Pematangsiantar yang demokratis, sehat dan santun. | Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat. | 1. Meningkatnya Pendidikan dan budaya Politik masyarakat. | 72% | 77% | 80% | 85% | 90% |
|  | 2. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara Infra dan Supra struktur politik di Kota Pematangsiantar | 78% | 80% | 83% | 86% | 90% |
|  | 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% |

**BAB VIII PENUTUP**

Seiring dengan peningkatan kualitas SDM sebagai suatu hasil pembangunan selama ini, maka tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik juga akan selalu meningkat. Dilain pihak Pemerintah dihadapkan pada sumber daya pembangunan yang semakin terbatas, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah harus dapat menyusun suatu perencanaan yang akurat. Bentuk perencanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah Renstra. Penyusunan Renstra ini juga dilakukan dalam rangka mengembangkan sistem akuntabilitas sesuai Intrusksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar pelaksanaan pemerintahan lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Rencana Strategis Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar ini adalah merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berlaku untuk masa lima tahun yaitu tahun 2017-2022. Dokumen ini disusun sebagai arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh bagian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar dalam mewujudkan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat yang Baik. Pernyataan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi seluruh bagian di lingkungan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menggerakkan seluruh sumber dayanya dalam rangka mewujudkan gambaran kondisi masa depan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar sebagai suatu cita-cita bersama.

Rencana Strategis ini disusun dengan mengikuti aturan yang berlaku. Sebaik apapun suatu rencana disusun tidak akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan secara konsisten, oleh karena itu diperlukan komitmen bersama dalam pelaksanaannya agar dapat mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat diwujudkan secara optimal.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR**

**Drs. LUKAS BARUS**

**PEMBINA UTAMA**

**NIP. 19630609 199003 1 004**